



**ANALISIS PELANGGARAN SPIONASE DALAM HUBUNGAN  
DIPLOMATIK MENURUT KONVENSI WINA 1961  
TERHADAP ANCAMAN PERKEMBANGAN KOMUNIKASI  
DIGITAL**

**SKRIPSI**

**GRACE ANGGITA ZEFANYA**

**1710611314**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN**

**JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM**

**2024**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM**

---

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**JUDUL :**

**ANALISIS PELANGGARAN SPIONASE DALAM HUBUNGAN  
DIPLOMATIK MENURUT KONVENSI WINA 1961 TERHADAP  
ANCAMAN PERKEMBANGAN KOMUNIKASI DIGITAL**

**GRACE ANGGITA ZEFANYA**

**1710611314**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji  
Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 27 Juni 2024

Mengetahui  
Ketua Program Studi S1 Hukum

Abdul Kholiq, S.H., M.H.  
NIP 199110132022031006

Menyetujui  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Davilla Prawidya Azaria, S.H., M.H.  
NIP 199208302020122016



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM**

---

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Grace Anggita Zefanya  
NPM : 1710611314  
Program Studi : S1 Hukum  
Judul : Analisa Pelanggaran Spionase dalam Hubungan Diplomatik menurut Konvensi Wina 1961 terhadap Ancaman Perkembangan Komunikasi Digital

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Ketua Penguji  
Dr. Diani Sadiawati, S.H., LL.M.

Anggota 1  
M. Rizki Yudha Prawira, S.H., M.H.

Anggota 2  
Davilla Prawidya Azaria, S.H., M.H.

Dekan  
Dr. Sumerman, S.H., LL.M.

Kaprodi  
Abdul Kholiq, S.H., M.H.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal Ujian : 08 Juli 2024

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Grace Anggita Zefanya

NIM : 1710611314

Tanggal : 27 Juni 2024

Tanda Tangan :





## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Grace Anggita Zefanya

NIM/NPM : 1710611314

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Judul : **Analisis Pelanggaran Spionase dalam Hubungan Diplomatik menurut Konvensi Wina 1961 terhadap Ancaman Perkembangan Komunikasi Digital**

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Nonexclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan ~~SETUJU/TIDAK SETUJU\*~~ untuk melanjutkan pengolahan data skripsi/memorandum hukum\*) menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan ~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA\*~~ mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 27 Juni 2024

Yang menyatakan,



Grace Anggita Zefanya

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan kasih karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan bentuk skripsi yang berjudul “**Analisis Pelanggaran Spionase dalam Hubungan Diplomatik menurut Konvensi Wina 1961 terhadap Ancaman Perkembangan Komunikasi Digital**”. Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua Orang Tua Penulis yang selalu memberikan doa, segala bentuk dukungan, pengertian dan kasih sayang kepada Penulis;
2. Bapak Dr. Suherman, S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Jakarta;
3. Bapak Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Jakarta;
4. Bapak Taupiqqurahman, S.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Jakarta;
5. Bapak Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Jakarta;
6. Bapak Abdul Kholiq, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Jakarta;
7. Ibu Davilla Prawidya Azaria, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah membantu dan memberikan arahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
8. Ibu Sylvana Murni Deborah Hutabarat, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
9. Ibu Dwi Aryanti Ramadhani, S.H., M.H. yang telah memberi motivasi kepada Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Jakarta yang telah memberikan ilmu yang berguna dalam menyusun tugas akhir ini;
11. Saudara dan kerabat dekat Penulis yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan motivasi dan nasihat kepada Penulis;

12. Teman-teman terdekat Penulis yang selalu mendukung Penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini;
13. Pihak-pihak lainnya yang secara sengaja maupun tidak sengaja memberikan motivasi dan inspirasi kepada Penulis untuk terus berjuang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis mengharapkan segala bentuk kritik dan saran yang membangun. Penulis juga berharap tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

## ABSTRAK

Tindakan spionase yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik negara pengirim terhadap negara penerima merupakan bentuk pelanggaran dari hak keistimewaan dan kekebalan diplomatik. Perkembangan teknologi yang cepat, terutama di ranah Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence* atau AI), telah memudahkan pengawasan yang digunakan oleh negara-negara. Kemampuan AI menimbulkan pertanyaan etis dan hukum tentang batas-batas praktik pengawasan dan potensi tindakan rahasia yang mungkin melanggar norma dan hukum internasional. Penelitian ini akan menganalisis mengenai pengaturan spionase yang diatur oleh Konvensi Wina 1961 dan relevansinya dalam menghadapi perkembangan komunikasi digital seperti AI. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Setelah melakukan penelitian, Penulis menemukan bahwa konsekuensi dari spionase adalah negara penerima dapat menyatakan diplomat *persona non grata* yang diatur dalam Pasal 9 Konvensi Wina 1961 dan *Waiver of immunity* yang diatur dalam Pasal 32 Konvensi Wina 1961. Kebaharuan teknologi seperti AI dapat mendukung adanya kebaharuan sistem diplomatik. Namun, perkembangan teknologi ini memudahkan terjadinya kegiatan spionase. Beberapa ketentuan dalam Konvensi Wina 1961 perlu interpretasi baru untuk mengatur perkembangan teknologi dalam hubungan diplomasi. Negara-negara dan Organisasi Internasional perlu membentuk kerangka hukum dan peraturan yang kuat untuk mengatur AI dalam hubungan diplomatik antar negara dan perkembangan sistem diplomasi.

**Kata kunci :** Spionase, Konvensi Wina 1961, *Artificial Intelligence*



## ABSTRACT

*Acts of espionage committed by diplomatic representatives of the sending state towards the receiving state are a form of violation of diplomatic privileges and immunities. Rapid technological developments, particularly in the domain of Artificial Intelligence (AI), have made it easier for states to conduct surveillance. AI capabilities raise ethical and legal questions about the limits of surveillance practices and potential covert actions that may violate international norms and laws. This study will analyze the regulation of espionage regulated by the Vienna Convention on Diplomatic Relation 1961 and its relevance in the face of developments in digital communications such as AI. The writing method used in this study is normative legal research with a statue approach. After conducting research, the author discovered that the consequence of espionage is that the receiving state can declare the diplomat persona non grata as stipulated in Article 9 of the Vienna Convention on Diplomatic Relation 1961 and Waiver of immunity as stipulated in Article 32 of the Vienna Convention on Diplomatic Relation 1961. Technological advances such as AI can support the development of a new diplomatic system. However, this technological development eases the occurrence of espionage activities. Some provisions in the Vienna Convention on Diplomatic Relation 1961 need new interpretation to regulate technological developments in diplomatic relations. States and International Organizations need to establish a strong legal and regulatory framework to regulate AI in diplomatic relations between states and the development of diplomatic systems.*

**Keywords:** *Espionage, Vienna Convention on Diplomatic Relation 1961, Artificial Intelligence*

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>BIODATA PENULIS</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu ( <i>Literature Review</i> ).....	12
B. Tinjauan Teori .....	13
<b>BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN</b> .....	<b>25</b>
A. Kasus Spionase Bulgaria.....	25
B. Kasus Victor Manuel Rocha.....	26
C. Spionase .....	27
D. Penyadapan dan Spionase .....	30
E. Artificial Intelligence (AI) .....	34
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b> .....	<b>37</b>
A. Pengaturan mengenai Spionase yang dilakukan oleh Pejabat Diplomat Negara Pengirim di Negara Penerima .....	37
B. Relevansi Pengaturan Spionase Konvensi Wina 1961 dalam menghadapi tantangan perkembangan komunikasi digital seperti <i>Artificial Intelligence</i> (AI) .....	49

<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>70</b>